

**MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATANG**

Oleh:

Nurul Hikmah Insani, Endang Larasati, Dyah Lituhayu

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang memiliki pekerjaan rumah terkait tugas pengelolaan sampah. Sampah di Kabupaten Batang sendiri dapat terbilang cukup banyak namun pengelolaannya masih belum optimal, terlihat dari lonjakan tonase sampah harian dari 150-200 ton pada 2018-2019 menjadi 500 ton pada 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang sumber datanya berasal dari wawancara dengan informan dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang No 18 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati No 40 Tahun 2019 telah ada, manajemennya belum optimal dalam mengatasi peningkatan volume sampah harian. DLH menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan limbah B3 yang umumnya ditangani oleh pihak swasta, serta perluasan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kerja sama dengan bank sampah. Struktur organisasi DLH, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan kualifikasi dan pelatihan SDM untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, Manajemen Publik, Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

Batang Regency had significant challenges related to waste management. The amount of waste in Batang Regency was quite large, but its management was still not optimal, as evidenced by the spike in daily waste tonnage from 150-200 tons in 2018-2019 to 500 tons in 2023. This research aimed to analyze waste management by the Environmental Service (DLH) of Batang Regency. The research method used was descriptive with a qualitative approach, with data sourced from interviews with informants and documentation, as well as data analysis using triangulation. The research results showed that although regulations such as Law No. 18 of 2008 and Regent's Regulation No. 40 of 2019 existed, their implementation was not yet optimal in dealing with the increase in daily waste volume. DLH faced significant challenges in managing B3 waste, which was generally handled by the private sector, as well as expanding efforts to increase public awareness through outreach and collaboration with waste banks. The DLH organizational structure, including the Regional Technical Implementation Unit (UPTD), showed quite good performance, but still required improvement in human resource qualifications and training to optimize waste management in Batang Regency.

Keywords: Community, Environmental Service (DLH) of Batang Regency, Human Resources, Public Management, Waste Management

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, bisnis, atau proses produksi rumah tangga disebut sebagai sampah. Salah satu sumber masalah yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi alam yang semakin memburuk adalah sampah (Damanhuri, 2010). Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton sampah pada tahun 2022, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Metode 3R (*Reuse, Recycle, dan Reduce*) digunakan untuk memilah sampah dari sumbernya hingga proses pengelolaan akhir untuk mengurangi sampah. Salah satu

daerah yang memiliki tugas terkait pengelolaan sampah adalah Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang sendiri, sampah dapat menumpuk cukup banyak. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Batang akhirnya mengambil tindakan akibat sampah ini. Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Batang untuk menjaga kebersihan tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan di sana.

Tabel Data Volume Sampah dari Tahun 2010- 2019 di Kabupaten Batang

Tahun	Produksi Sampah	Terangkut	Persentase
Year	Waste Production	Transported	Percentage
2010	24 3,29	14 1,99	5 8,36

Tahun	Produksi Sampah	Terangkut	Persentase
2011	24 9,48	14 5,98	5 8,51
2012	25 2,42	14 9,54	5 9,24
2013	26 1,53	15 2,16	5 8,18
2014	26 5,3	15 7,78	5 9,47
2015	31 3,2	19 5,7	6 2,48
2016	39 0,9	2 44,3	6 2,5
2017	34 4,96	7 1,95	2 0,86
2018	22 8,71	7 6,51	3 3,45
2019	23 0,57	8 1,63	3 5,40

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kab Batang, 2023).

Berdasarkan tabel 1.1 volume sampah dari tahun 2010-2019 di Kabupaten Batang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 semakin meningkat, namun di tahun 2017 dan 2019 volume sampah di Kabupaten Batang mengalami penurunan. Menurut data statistik terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya adalah sekitar 40 ton, dimana hanya sekitar 15 ton yang dapat dibawa ke TPA setiap harinya, dengan kapasitas pembuangan harian sekitar 35 ton. Mayoritas sampah yang dihasilkan di Kabupaten Batang adalah sampah rumah tangga atau perumahan, dimana 77,89%

merupakan sampah organik. Sampah ini dikirim ke TPA Randu Kuning Tegalsari sebanyak dua hingga empat kali sehari. Selanjutnya, menurut informasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batang, 78,34% dari sampah tersebut merupakan sampah organik, sedangkan 21,66% sisanya merupakan sampah anorganik.

Keterbatasan Alat Berat yang beroperasi di TPA Randukuning menjadikan sampah yang berada di wilayah TPA semakin cepat menumpuk sedangkan alat berat hanya beroperasi 1 unit saja untuk meratakan dan memilah sampah. (Wawancara Pribadi Petugas TPA Randukuning, 2023)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Kota ini masih mengelola sampah dengan model kuno kumpul-angkut-buang. Alat pengangkutan dan pengolahan sampah yang ada belum mampu menangani seluruh sampah yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memindahkan sampah dari banyak lokasi terhambat oleh ketiadaan armada di Kabupaten Batang.

Karena armada pengangkut sampah yang ada hanya berjumlah 13 unit - yang

masing-masing dapat mengangkut tiga truk pengangkut sampah - untuk mengakomodasi sampah di seluruh Kabupaten Batang, maka jumlah truk pengangkut sampah yang ada tidak mencukupi untuk mengangkut sampah dari kecamatan ke TPA. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya berada di wilayah Pantura dan delapan di Kecamatan Batang, 13 unit truk pengangkut sampah itu beberapa mengalami kerusakan seperti kerusakan mesin ataupun ban. Karena keterbatasan armada, dalam sehari pengangkutan sampah hanya dilakukan pada pagi dan sore hari (Wawancara Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Batang, 2023)

Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. Menurut Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2019, pengelolaan sampah di Kabupaten Batang masih belum memadai. Hal ini terlihat dari peningkatan tonase sampah harian di Kabupaten Batang yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada 2018-2019, per hari volume sampah di Batang di kisaran 150 ton hingga 200 ton. Lalu, saat ini sudah mencapai 500 ton sampah per hari. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah di

Kabupaten Batang diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Batang No 40 Tahun 2019. Selain itu Keterbatasan anggaran untuk penanganan sampah yang sangat minim. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.

Berdasarkan Fenomena yang telah dijabarkan di atas terdapat pertanyaan “Mengapa Sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Batang di Tempat Pembuangan Sampah Randukuning selalu menumpuk setiap hari?”. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Sampah di TPA Randukuning Kabupaten Batang”**

LANDASAN TEORITIK

Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya dalam formulasi, manajemen, serta mengelola keputusan kebijakan publik. Tujuan dari administrasi publik yakni untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat melalui penyempurnaan dan perbaikan pada aspek organisasi, sumberdaya manusia, serta keuangan, Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014).

Manajemen Publik

Manajemen publik didefinisikan sebagai manajemen pemerintahan, menurut Nor Ghofur (2014). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen publik juga bertujuan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengatur layanan publik. Administrasi Publik digambarkan sebagai upaya individu untuk membunuh ketika mengelola organisasi dan pemanfaatan sumber daya (orang dan peralatan) untuk mencapai tujuan organisasi, menurut Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2008:93).

Pengertian Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa padat dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam. Manusia menghasilkan sampah setiap kali melakukan aktivitas sehari-hari. Sampah dapat dikategorikan menurut bentuk dan jenisnya. Sampah didefinisikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai sampah yang dihasilkan selama kegiatan produksi, baik industri maupun rumah tangga. (Lingkungan Hidup, 2019).

Pengelolaan Sampah

Pengumpulan, pemindahan, pemrosesan, dan daur ulang barang-barang limbah dikenal sebagai pengelolaan limbah.

Frasa ini sering merujuk pada sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan ditangani untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, atau estetika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2018:213) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang diterapkan pada latar ilmiah (eksperimen) di mana peneliti memanfaatkan perangkat, prosedur pengumpulan data, dan analisis kualitatif yang lebih menekankan pada makna.

Analisis data menggunakan teknik analisis data yang menurut Miles dan Huberman dalam (Subadi, 2006), meliputi:

1. Reduksi Data

Prosedur untuk memilih, menekankan, mengabstraksi, dan mengubah materi yang belum diolah yang berasal dari catatan lapangan yang ditulis.

2. Penyajian Data

Kegiatan yang melibatkan pengorganisasian sekumpulan data sedemikian rupa sehingga memungkinkan

untuk membuat penilaian dan mengambil tindakan. Peneliti akan memberikan informasi tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dalam penelitian ini.

3. Atlas ti

Atlas ti merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menganalisis data kualitatif yang bersumber dari data yang berupa teks, grafis, audio maupun video. Pelaksanaan analisis data ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan software Atlas ti yang merupakan singkata dari *Archiv fur Technik, Lebenswelt, Altags Sprache (Archive of Technology, Lifeworld, and Everyday Language)*.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap berikutnya setelah reduksi dan penyajian data adalah memperoleh temuan dari analisis data menjadi kesimpulan yang dapat dipahami dengan jelas untuk memberikan informasi tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang

Dalam analisis terkait manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, teori manajemen George R. Terry memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana pengelolaan sampah dapat dioptimalkan. Terry mengidentifikasi empat fungsi manajemen utama: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam konteks DLH Kabupaten Batang, pengelolaan sampah menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan setiap fungsi manajemen ini.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) merupakan langkah krusial dalam pengelolaan sampah yang harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai efektivitas. Di Kabupaten Batang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah merancang strategi pengelolaan sampah yang berfokus pada prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*) serta penanganan sampah secara komprehensif. Strategi ini mencakup berbagai inisiatif untuk mengurangi volume sampah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Namun, manajemen strategi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyesuaian dengan peraturan yang semakin ketat dan meningkatnya volume sampah yang

mencapai 500 ton per hari, yang memerlukan penanganan yang lebih terstruktur dan sumber daya yang memadai.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang No 18 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati No 40 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan sampah, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal. Permasalahan utama terletak pada manajemen peraturan yang belum sepenuhnya efektif dan adanya kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan kondisi dan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan peraturan serta kondisi lapangan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Adha (2020), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, seperti melalui inisiatif Bank Sampah, dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan komunitas dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif adalah kunci untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Integrasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidak hanya membantu

dalam penanganan sampah tetapi juga mendukung keberhasilan strategi 3R dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan komunitas dalam pengelolaan sampah sehari-hari.

Bank sampah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengelola sampah dan meningkatkan keuntungan bisnis lokal. Tumpukan sampah dapat mengurangi masalah lingkungan dengan menggunakan sampah organik atau non-organik berdasarkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah. Manfaat yang diperoleh dari bank sampah antara lain membuat lingkungan tampak bersih, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan memberikan nilai ekonomis pada sampah. Kehadiran bank sampah memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan lebih karena sebagai imbalan atas sampah yang mereka tukarkan, mereka akan memperoleh uang yang akan disetorkan ke rekening mereka. Dengan adanya bank sampah, sampah yang tidak bernilai jual dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti kerajinan tangan dan pupuk yang bernilai ekonomis (Pramono et al, 2023).

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sampah yang memerlukan perhatian untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Di Kabupaten Batang, DLH memiliki struktur organisasi yang mencakup pimpinan dan unit pelayanan teknis daerah (UPTD) yang bertugas mengelola pengangkutan sampah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM), yang mempengaruhi kemampuan unit teknis dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. Penelitian Anggraini (2019) menyoroti bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemisahan sampah di daerah lain, seperti Kota Semarang, berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan sampah. Hal ini relevan untuk DLH Kabupaten Batang, yang perlu melakukan penyesuaian struktural untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Untuk meningkatkan pengorganisasian, DLH Kabupaten Batang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan alokasi sumber daya. Penyesuaian struktural yang diperlukan mencakup penguatan peran unit-unit teknis dan peningkatan fasilitas serta pelatihan bagi SDM. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap unit dapat berfungsi dengan baik dalam melaksanakan

tugasnya dan menangani tantangan yang ada. Dengan adanya penyesuaian ini, DLH dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan merespons kebutuhan yang berkembang secara lebih baik.

Mengadopsi praktik-praktik yang terbukti efektif di daerah lain, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi. Penelitian Anggraini (2019) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan sampah dapat meningkatkan hasil pengelolaan secara signifikan. Oleh karena itu, DLH Kabupaten Batang perlu mengintegrasikan strategi-strategi ini dalam pengorganisasian mereka, dengan fokus pada penguatan struktur organisasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Ini akan membantu dalam mengatasi tantangan yang ada dan memastikan pengelolaan sampah yang lebih efektif di masa depan.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*Actuating*) dalam pengelolaan sampah di DLH Kabupaten Batang menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas program. DLH Kabupaten Batang telah menerapkan pendekatan pengangkutan langsung dari rumah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),

bertujuan untuk menyederhanakan proses pengelolaan sampah. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala dalam menyesuaikan operasi lapangan dengan standar yang ditetapkan. Penelitian Aditya (2022) mengidentifikasi kurangnya partisipasi penghuni dalam pemisahan sampah dan pengawasan yang tidak memadai oleh dinas terkait sebagai kendala utama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan telah dilakukan dengan baik, pelaksanaan di lapangan memerlukan penyesuaian tambahan untuk memastikan manajemen yang efektif dari strategi pengelolaan sampah.

Dalam konteks *actuating*, DLH Kabupaten Batang beroperasi berdasarkan berbagai peraturan yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja, termasuk Peraturan Bupati (PERBUP) seperti PERBUP Nomor 2 Tahun 2018, PERBUP Nomor 57 Tahun 2021, dan perubahan terbaru melalui PERBUP Nomor 14 Tahun 2023. Peraturan ini menetapkan kedudukan dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang bertanggung jawab atas operasional TPA dan kebersihan jalan. Struktur organisasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, dengan kolaborasi antara bidang pengelolaan sampah dan lingkungan di DLH.

Penyesuaian dalam struktur organisasi dan penerapan prosedur operasional standar (SOP) merupakan upaya untuk memperbaiki pelaksanaan tugas.

Namun, perubahan regulasi dan tantangan administratif dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan koordinasi dan adaptasi berkelanjutan dalam manajemen kebijakan dan prosedur. Hal ini termasuk peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemisahan sampah, serta penegakan praktik yang konsisten. Tanpa perhatian yang cukup terhadap penyesuaian operasional dan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak, pencapaian hasil yang optimal dalam pengelolaan sampah akan tetap menjadi tantangan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) adalah elemen krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Batang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. DLH Kabupaten Batang telah melakukan berbagai evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan pengelolaan sampah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat kekurangan signifikan dalam

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pengawasan operasional. Penelitian Suryo (2021) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap angkutan sampah merupakan masalah utama yang menghambat pengawasan yang efektif.

Kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum dan pengawasan menggarisbawahi perlunya peningkatan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan. Penilaian menyeluruh terhadap kinerja pengelola sampah harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pengelolaan sampah, mulai dari pengangkutan hingga pembuangan akhir, berjalan sesuai dengan rencana. Ini termasuk evaluasi terhadap efektivitas prosedur operasional standar (SOP) dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Peningkatan pengawasan akan membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.

Untuk mencapai hasil yang optimal, DLH Kabupaten Batang perlu menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur, yang mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi SDM yang

terlibat. Selain itu, penguatan penegakan hukum dan manajemen mekanisme evaluasi yang konsisten akan membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan sampah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang dapat diperbaiki, meminimalisir pelanggaran, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang

Hambatan-Hambatan Dalam Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas operasional mereka.

1. Man (Manusia)

Berdasarkan analisis G.R. Terry, salah satu hambatan utama adalah terkait dengan *Man* (Manusia). DLH Kabupaten Batang menghadapi tantangan serius terkait dengan keterbatasan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM). Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan keterampilan pengelola sampah

mempengaruhi efektivitas operasional harian, terutama dalam memilah dan mengelola sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kurangnya pelatihan dan pengetahuan juga berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan sekitar TPA, yang memperlihatkan perlunya peningkatan kompetensi dan kesadaran SDM untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif. Penelitian terdahulu, seperti oleh Adha (2020), menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan untuk SDM dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi langkah kunci dalam mengatasi masalah ini.

2. *Money* (Uang)

Hambatan kedua adalah terkait dengan *Money* (Uang). Keterbatasan anggaran yang dimiliki DLH Kabupaten Batang menjadi kendala signifikan dalam pengelolaan sampah. Meskipun ada upaya untuk mengajukan anggaran yang lebih besar ke pemerintah pusat untuk membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), alokasi dana yang diterima sering kali tidak memadai. Situasi ini diperparah dengan pertumbuhan perumahan yang pesat di Batang, yang menambah kompleksitas

dalam kebutuhan pengelolaan sampah. Perumahan baru diharuskan untuk mengelola iuran mereka sendiri karena keterbatasan armada pengangkut yang tersedia. Penelitian Ariyanti (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan regulasi dan pembiayaan yang memadai, yang menekankan perlunya anggaran yang cukup untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah yang efektif.

3. *Materials* (Bahan)

Hambatan berikutnya adalah terkait dengan *Materials* (Bahan). DLH Kabupaten Batang menghadapi masalah kapasitas di TPA yang ada, yang sudah overload dan tidak dapat menangani volume sampah yang terus bertambah akibat pertumbuhan pemukiman. Jarak antara sumber sampah di desa dengan TPA di kota juga menambah kesulitan dalam efisiensi pengangkutan. Kurangnya Tempat Penampungan Sampah (TPS) di berbagai lingkungan menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan, yang mengindikasikan perlunya infrastruktur yang memadai. Penelitian Permatasari et al. (2017) menunjukkan bahwa meskipun strategi pengelolaan sampah bisa baik, manajemen yang buruk terkait bahan dan infrastruktur dapat menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya

komitmen dari pengembang perumahan untuk membangun TPS sesuai dengan komitmen perencanaan lingkungan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih sistematis.

4. *Methods* (Metode)

Aspek *Methods* (Metode) juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Meskipun telah dilakukan sosialisasi melalui banner dan himbauan, manajemennya masih kurang efektif. Penegakan aturan yang tidak konsisten dan kurangnya penangan tegas menjadi kendala utama. Penelitian Suryani (2016) menunjukkan bahwa program berbasis bank sampah dapat memberikan dampak positif jika disertai dengan kesadaran masyarakat dan penegakan aturan yang tegas. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam penegakan aturan serta peningkatan metode sosialisasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah secara tepat. Penegakan aturan yang lebih ketat dan contoh seperti yang diterapkan di Singapura, dengan denda signifikan bagi pelanggar, bisa menjadi model untuk meningkatkan efektivitas metode pengelolaan sampah.

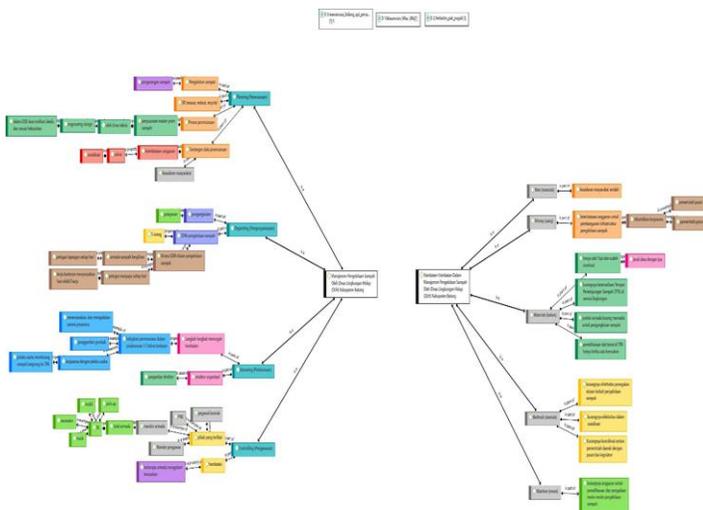
5. *Machine* (Mesin)

Dalam konteks *Machine* (Mesin), kekurangan anggaran juga mempengaruhi pemeliharaan dan pengadaan mesin pengelolaan sampah. Keterbatasan anggaran telah menyebabkan banyak mesin tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Meskipun ada ekskavator yang dipelihara, jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional. Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam peralatan yang memadai sangat penting untuk menjaga kelancaran pengelolaan sampah. Oleh karena itu, alokasi dana untuk pemeliharaan dan pengadaan mesin harus diperhatikan agar operasional pengelolaan sampah tidak terganggu.

Maka dari itu, hambatan dalam manajemen pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Batang menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai aspek manajemen. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah bergantung pada faktor-faktor seperti pembiayaan yang memadai, infrastruktur yang cukup, metode sosialisasi dan penegakan aturan yang konsisten, serta pelatihan SDM. Memperhatikan dan mengatasi hambatan-hambatan ini dengan memilih tindakan yang tepat, program pengelolaan sampah Kabupaten Batang dapat dibuat lebih efektif dan berkelanjutan.

C. Hasil Networking menggunakan Atlas, Ti

Gambar 3.2 *Networking* Manajemen Serta Hambatan Hambatan Dalam Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan Atlas, Ti, 2024

Berdasarkan dari analisis yang dilakukan terhadap Manajemen Serta Hambatan Hambatan Dalam Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang dengan menggunakan bantuan oleh software atau perangkat lunak Atlas.Ti diperoleh hasil dalam dua bagian. Terkait manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, dilakukan dengan menggunakan empat tahapan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan yang keseluruhannya terdiri atas kotak hijau. Pada tahapan perencanaan, terdiri atas beberapa bagian penting yaitu pengolahan sampah, 3r, proses perencanaan dan tantangan dalam perencanaan (kotak orange). Pada tahapan pengorganisasian, terdiri atas beberapa bagian penting yaitu pengangkutan dan sumber daya manusia pengelolaan sampah (kotak biru tua). Pada tahapan pelaksanaan, terdiri atas beberapa bagian penting yaitu langkah langkah dalam mencegah hambatan dan struktur organisasi (kotak pink). Pada tahapan pengawasan, terdiri atas beberapa bagian penting yaitu pihak yang terlibat dan hambatan (kotak kuning). Masing masing bagian penting dari keseluruhan tahapan tersebut kemudian dipengaruhi dan dapat disebabkan oleh faktor lainnya yang dijelaskan secara detail pada percabangan dari warna tersebut.

Berdasarkan dari analisis yang dilakukan terhadap Hambatan Hambatan Dalam Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang dengan menggunakan bantuan oleh software atau perangkat lunak Atlas.Ti diperoleh hasil bahwa hambatan hambatan tersebut terdiri atas *man* atau manusia, *money* atau uang, *materials* atau bahan, *methods* atau metode dan *machine*

atau mesin (kotak abu abu). Hambatan yang disebabkan oleh manusia (kotak abu abu) dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang rendah (kotak orange). Hambatan yang disebabkan oleh uang (kotak abu abu) dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah (kotak orange) yang dapat diatasi dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hambatan yang disebabkan oleh bahan (kotak abu abu) dapat dipengaruhi oleh beberapa akibat seperti hanya ada 1 tempat pembuangan akhir dan sering terjadi penumpukan (kotak hijau), kurangnya ketersediaan tempat penampungan sampah di semua lingkungan (kotak hijau) jumlah armada kurang memadai untuk pengangkutan sampah (kotak hijau) serta pemeliharaan alat berat yang ada di tempat pembuangan akhir hanya ketika terjadi kerusakan (kotak hijau). Hambatan yang disebabkan oleh metode (kotak abu abu) disebabkan oleh kurangnya efektivitas penegakan aturan terkait pengelolaan sampah (kotak kuning), kurangnya efektivitas dalam sosialisasi (kotak kuning) dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat dan legislator (kotak kuning). Hambatan yang disebabkan oleh mesin (kotak abu abu) disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk

pemeliharaan dan pengadaan mesin mesin pengelolaan sampah (kotak hijau muda).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-Undang No 18 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati No 40 Tahun 2019, manajemennya masih belum optimal, terutama dalam mengatasi peningkatan volume sampah harian yang mencapai 500 ton. DLH Kabupaten Batang juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah B3, yang umumnya ditangani oleh pihak swasta. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kerja sama dengan bank sampah sedang dilakukan, namun perlu diperluas untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Meskipun telah memiliki struktur organisasi yang melibatkan pimpinan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), manajemen kebijakan menghadapi

kendala signifikan terkait fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). Evaluasi kinerja menunjukkan bahwa SDM di UPT Persampahan dinilai cukup baik, meskipun perlu peningkatan kualifikasi dan pelatihan terampil, terutama mengingat rencana pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

2. Dalam konteks hambatan-hambatan dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, terbatasnya jumlah dan kualifikasi SDM menjadi hambatan, mempengaruhi efektivitas operasional harian DLH dalam memilah dan mengelola sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hambatan selanjutnya adalah keterbatasan anggaran, yang sulit memenuhi kebutuhan untuk membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di tengah pertumbuhan perumahan yang cepat di Batang. Materi, seperti kapasitas terbatas TPA yang overload dan kurangnya Tempat Penampungan Sampah (TPS), juga menambah kesulitan dalam pengelolaan sampah. Metode manajemen kebijakan yang belum konsisten dan infrastruktur yang

terbatas juga menjadi tantangan, sementara kurangnya anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan mesin pengelolaan sampah mempengaruhi kelancaran operasional di lapangan, termasuk perawatan tempat sampah di area publik.

B. Saran

Berdasarkan hambatan-hambatan yang diidentifikasi dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, berikut adalah saran penelitian yang diajukan:

1. DLH Kabupaten Batang perlu menginisiasi program daur ulang yang terstruktur untuk sampah anorganik seperti kaca, plastik, dan logam. Program ini dapat mencakup pengadaan fasilitas daur ulang yang memadai, serta pelatihan kepada masyarakat mengenai cara memilah sampah dengan benar. Selain itu, bisa diadakan kampanye rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengurangan sampah.
2. Masyarakat Kabupaten Batang perlu lebih aktif memilah sampah organik dan anorganik di rumah merupakan

cara sederhana bagi warga Kabupaten Batang untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk mendaur ulang sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam dengan memanfaatkan bank sampah di lingkungan sekitar. Dengan cara ini, masyarakat dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil daur ulang sekaligus membantu mengurangi jumlah sampah yang harus dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, N. (2020). Manajemen Pengelolaan sampah di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Aditya, M. F. E. (2022). Analisis Manajemen Pengelolaan Sampah di Rusunawa Pekunden (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Anggraeni, E. Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.
- Ariyani, E. A., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 364-379.
- Azwar, Azrul. (1990). Pengantar Ilmu Lingkungan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Cindy Mutia Annur. (2023, Maret 09). "Komposisi Timbulan Sampah di Indonesia Berdasarkan Jenisnya". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Pengelolaan,sebanyak%2031%2C13%20juta%20ton, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 11.15>
- Elvira, S. (2016). Manajemen Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi. *Jurnal A*
- Fina, R. A. (2020). Engaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang. 23.
- Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2008). *Bisnis*, edisi 8, jilid 1. Erlangga.

- Hersey P, Blanchard K, Johnson D. (2013). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. 7a ed. New Jersey: Prentice-Hall.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. (2006). "Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik". Malang: Yayasan Pembangunan Nasional Kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan Indonesia Print Malang.
- Jumadi. (2023, Maret 02). "TPA Randukuning overload dan kritis".
<https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=10416>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.00.
- Kakesing, S. S., Rares, J., & Londa, V. (2022). Manajemen Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertahanan Kabupaten Sitiro. *Jurnal Administrasi Publik*, 8 (119).
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Ilmu Administrasi Negara: Konsep, Teori, dan Isu*.
- KLHS, T. P. (2017). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLH) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pengunungan Kendeng Yang Berkelanjutan*.
- Larasati, E. (2008). Reformasi Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 1-14.
- Larasati, E. (n.d.). *Pelayanan Publik Dan Demokrasi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 1-10.
- Lingkungan Hidup, D. (2019). Retrieved from Laporan Antara - Kajian Timbulan Sampah Harian Permukiman Kulon Progo: <https://dlh.kulonprogokab.go.id/files/Bab%2020Permukiman%20-%20Akhir.pdf>
- Lovenadewi. (2014). "Paradigma Administrasi Negara (Henry Fayol)". <https://lovenadewi.wordpress.com/mata-kuliah-an/paradigma-administrasi-negara/5-paradigma-administrasi-negara-henry-fayol/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 Pukul 14:19.
- Luvita, S. (2018). *Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Dalang Collection Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation,

- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Permatasari, B. I. (2017). Manajemen Strategi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 5(6).
- Ponomban, G., Lengkong, F., & Londa, V. (2019). Manajemen Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(75).
- PP, J. N., Lestari, E., & Widowati, N. (2015). Manajemen pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(1), 161-174.
- Praditya, O. (2012). Studi kualitatif manajemen pengelolaan sampah di kelurahan Sekaran Kota Semarang. *Unnes Journal of Public Health*, 1(2).
- Pramono, S. Adhi., Heru B. Sanggoro., Priyono Yulianto. (2023). Manfaat Bank Sampah Dalam Upaya Pengendalian Sampah Domestik Di Desa Kalisalak Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*. Vol. 2 no. 1.
- Sahil, J., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. *Jurnal Bioedukasi*, 4(2).
- Sukarna, D. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Suryo, S. T. (2021). *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Rumbai Pesisir)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (1999). *Dasar-dasar Manajemen, Principle of Management (Dasar-dasar Manajemen)* terj. GA Ticoalu, Cet. VI. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, P. E., Grossmeier, J., Mangen, D. J., & Gingerich, S. B. (2013). Analyzing best practices in employee health management. *Journal of occupational and environmental medicine*, 55(4), 378-392.
- UlfaPuspa. (2023, Maret 03). "Miris TPA Batang Overload, Timbunan Sampah Capai 250".://lingkarjateng.id/news/miris-tpa-batang-overload-timbunan-sampah-

capai-250-ton-per-hari/, diakses pada 15
Maret 2023 pukul 10.00